

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK 2026

## INFORMASI BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Link Dokumen
1	Profil Badan Kesbangpol	Informasi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, visi dan misi	Kepala Badan Kesbangpol	2026 – Selayar	Hardcopy & Softcopy (PDF)	Selama berlaku	-
2	Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029	Dokumen perencanaan strategis lima tahunan	Sekretaris Badan	2026 – Selayar	Dokumen PDF	5 Tahun	-
3	Rencana Kerja (Renja) 2026	Dokumen rencana program dan kegiatan tahunan	Sekretaris Badan	2026 – Selayar	Dokumen PDF	1 Tahun	-
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	Dokumen rincian program dan anggaran tahun berjalan	Kasubag Keuangan	2026 – Selayar	Hardcopy & Softcopy	1 Tahun Anggaran	-
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2026	Laporan capaian kinerja perangkat daerah	Sekretaris Badan	2026 – Selayar	Dokumen PDF	5 Tahun	-
6	Laporan Realisasi Anggaran 2026	Laporan penggunaan anggaran dan realisasi keuangan	Kasubag Keuangan	2026 – Selayar	Dokumen	5 Tahun	-

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Link Dokumen
7	Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar	Data ormas yang terdaftar dan aktif	Kabid Ketahanan Ekososbud & Ormas	2026 – Selayar	Database	Selama aktif	-
8	Data Partai Politik Peserta Pemilu	Data partai politik yang terdaftar	Kabid Politik Dalam Negeri	2026 – Selayar	Database	Selama berlaku	-
9	Program Pendidikan Politik	Informasi kegiatan pendidikan politik & wawasan kebangsaan	Kabid Politik Dalam Negeri & Ormas	2026 – Selayar	Dokumen & Foto	3 Tahun	-
10	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi kegiatan pembinaan ideologi & ketahanan nasional	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekososbud Agama	2026 – Selayar	Dokumen	3 Tahun	-
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Informasi kegiatan deteksi dini, koordinasi kewaspadaan nasional, serta fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah	Kabid Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	2026 – Selayar	Dokumen	3 Tahun	-
11	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	Dokumen SOP pelayanan publik	Sekretaris Badan	2026 – Selayar	Dokumen	Selama berlaku	-

## II. INFORMASI SERTA MERTA

*(Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta apabila dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum)*

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi	Media Penyampaian
1	Informasi Potensi Konflik Sosial	Pemberitahuan adanya potensi konflik sosial yang berdampak luas	Kepala Badan	Rilis Resmi	Website, Media Sosial, Surat Edaran
2	Informasi Gangguan Stabilitas Keamanan Daerah	Informasi kondisi darurat terkait stabilitas politik dan keamanan	Kepala Badan	Pengumuman Resmi	Website & Koordinasi Media
3	Informasi Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Konflik	Keputusan penting terkait langkah penanganan konflik	Kabid Kewaspadaan Nasional	Dokumen & Siaran Pers	Website & Media Massa
4	Informasi Terkait Organisasi Terlarang	Informasi resmi terkait larangan/penertiban ormas sesuai ketentuan	Kepala Badan	Pengumuman	Website & Surat Resmi

## III. INFORMASI SETIAP SAAT

*(Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik melalui permohonan)*

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi	Keterangan
1	Data Ormas Lengkap	Data detail ormas terdaftar	Kabid Ormas	Database	Sesuai permohonan
2	Data Bantuan Keuangan Partai Politik	Data bantuan keuangan parpol	Kabid Politik	Dokumen	Sesuai ketentuan

<b>No</b>	<b>Judul Informasi</b>	<b>Ringkasan Informasi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Bentuk Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
3	Dokumen SOP Pelayanan	Salinan SOP layanan	Sekretaris	Dokumen	Terbuka
4	Data Rekomendasi Penelitian	Data permohonan dan penerbitan rekomendasi	Bidang terkait	Dokumen	Terbuka
5	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Kerja sama antar lembaga	Sekretariat	Dokumen	Sesuai ketentuan
6	Data Pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan & tindak lanjut	PPID Pembantu	Dokumen	Terbuka

# LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2026

No	Informasi (yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Jika Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan Jika Ditutup	Jangka Waktu
1	Data detail potensi konflik sosial (nama pihak, lokasi rawan, hasil deteksi dini)	Pasal 17 huruf a & c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi menimbulkan keresahan, provokasi, dan memperkeruh situasi keamanan	Stabilitas daerah tetap terjaga dan proses mediasi berjalan efektif	Selama kondisi masih rawan
2	Data intelijen kewaspadaan nasional dan laporan hasil monitoring	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Dapat mengganggu stabilitas keamanan dan strategi pencegahan konflik	Strategi pengamanan tetap efektif dan tidak disalahgunakan	5 Tahun
3	Data pribadi pengurus Ormas (NIK, alamat lengkap, nomor kontak pribadi)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Melanggar hak privasi dan berpotensi penyalahgunaan data pribadi	Hak privasi individu terlindungi	Selama data masih berlaku
4	Dokumen rekomendasi internal terkait pembinaan organisasi tertentu	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sebelum keputusan final	Menjaga objektivitas dan netralitas pemerintah daerah	Sampai keputusan ditetapkan

No	Informasi (yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Jika Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan Jika Ditutup	Jangka Waktu
5	Data laporan pengaduan masyarakat yang belum diverifikasi	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Dapat merugikan pihak tertentu dan memicu konflik baru	Menjamin proses klarifikasi berjalan adil	Sampai proses klarifikasi selesai
6	Dokumen strategi pengamanan kegiatan politik daerah	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Keamanan kegiatan tetap terkendali	Selama tahapan kegiatan berlangsung

Catatan:

Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik